

**PEMBERONTAKAN PEMERINTAHAN REVOLUSIONER
REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA SELATAN TAHUN
1956 – 1961 (SUMBANGAN MATERI PEMBERONTAKAN PRRI
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII
DI SMA SRIJAYA NEGARA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

DIKI TRI APRIANSYAH PUTRA

06041381621038

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020**

**PEMBERONTAKAN PEMERINTAHAN REVOLUSIONER
REPUBLIK INDONESIA
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 1956 – 1961
(SUMBANGAN MATERI PEMBERONTAKAN PRRI
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII
DI SMA SRIJAYA NEGARA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

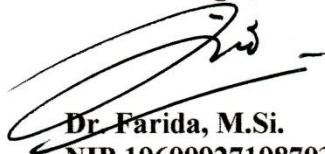
Diki Tri Apriansyah Putra

NIM: 06041381621038

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

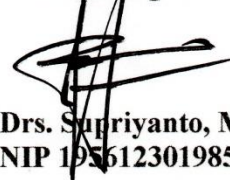
Pembimbing 1,



Dr. Farida, M.Si.

NIP 196009271987032002

Pembimbing 2,



Drs. Supriyanto, M.Hum.

NIP 195612301985031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan



Dr. Farida, M.Si

NIP196009271987032002

Koordinator Program Studi,



Dr. Syarifuddin, M.Pd

NIP 198411302009121004

**PEMBERONTAKAN PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK
INDONESIA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 1956-1961
(SUMBANGAN MATERI PEMBERONTAKAN PRRI PADA MATA
PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII DI SMA SRIJAYA
NEGARA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

Diki Tri Apriansyah Putra

NIM: 06041381621038

Program Studi Pendidikan Sejarah

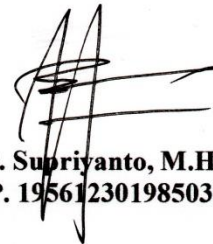
Disetujui,

Pembimbing 1



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

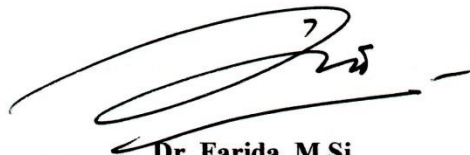
Pembimbing 2



**Drs. Supriyanto, M.Hum.
NIP. 195612301985031001**

Disahkan,

**a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diki Tri Apriansyah Putra

NIM : 06041381621038

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 (Sumbangan Materi Pemberontakan PRRI Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII Di SMA Srijaya Negara Kota Palembang) “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 2020
Yang membuat pernyataan



Diki Tri Apriansyah Putra
NIM 06041381621038

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 (Sumbangan Materi Pemberontakan PRRI Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII Di SMA Srijaya Negara Kota Palembang)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farida, M.Si. dan Drs. Supriyanto, M.Hum. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Dr. Syarifuddin, M.Pd., Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dr. Hudaidah, M.Pd., Drs. Alian, M.Hum., dan Dra. Yunani, M.Pd, anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan teman-teman yang telah memberikan doa dan motivasi selama penulis mengikuti pendidikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Palembang, 26 Juni 2020

Penulis,



Diki Tri Apriansyah Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I (PENDAHULUAN)	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.3.1 Skup Temikal	6
1.3.2 Skup Spasial	6
1.3.3 Skup Temporal.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II (LANDASAN TEORI).....	8
2.1 Teori Pemberontakan	8
2.2 Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	9
2.2.1 Aspek Politik	11
2.2.2 Aspek Ekonomi	14
2.2.3 Aspek Militer.....	17

2.3 Pergolakan Daerah.....	18
2.4 Pemerintahan Revolusiner Republik Indonesia.....	24
2.5 Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.....	26
2.5.1 Geografi	28
2.5.2 Kependudukan	28
2.5.3 Perekonomian Daerah.....	30
2.5.4 Mata Pencarian Masyarakat	31
2.5.5 Sosial-Masyarakat	32
2.5.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah	32
BAB III (METODOLOGI).....	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	35
3.2.1 Heuristik	35
3.2.2 Kritik Sumber	38
3.2.2.1 Kritik Ekstern	39
3.2.2.2 Kritik Intern.....	40
3.2.3 Interpretasi	42
3.2.4 Historiografi	44
3.3 Pendekatan 44	
3.3.1 Pendekatan Politik.....	45
3.3.2 Pendekatan Ekonomi.....	46
3.3.3 Pendekatan Sosiologi	46
BAB IV (PEMBAHASAN)	47
4.1 Proses Terbentuknya Pemberontakan PRRI di Sumsel.....	47
4.1.1 Pergolakan Daerah di Sumsel.....	47
4.1.2 Piagam Palembang	56
4.1.3 Meningkatnya Situasi Politik Daerah	59
4.1.4 Berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.....	69
4.2 Proses Terjadinya Pemberontakan PRRI di Sumsel	74
4.3 Akhir Pemberontakan PRRI di Sumsel	90

4.3.1 Akhir Pemberontakan PRRI di Sumsel	90
4.3.2 Dampak Pemberontakan PRRI di Sumsel	98
4.4 Sumbangan Materi Pemberontakan PRRI Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII di SMA Srijaya Negara Kota Palembang	100
BAB V.....	102
PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH TAHUN 1956	15
TABEL 2. 2 DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 1950	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....	112
Lampiran 2. SURAT IZIN PENELITIAN	131
Lampiran 3. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN	137
Lampiran 4 PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 1950	143
Lampiran 5. NASKAH MUKADIMMAH DEWAN PERJUANGAN	144
Lampiran 6. DOKUMEN MUKADIMMAH PIAGAM PERJUANGAN.....	145
Lampiran 7. DOKUMEN PIAGAM PERJUANGAN “MENYELAMATKAN NEGARA” ULTIMATUM DEWAN PERJUANGAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT	146
Lampiran 8. DOKUMEN PENDIRIAN PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA	148
Lampiran 9. SUSUNAN MENTERI PEMERINTAHAN REVULUSIONER REPUBLIK INDONESIA	149
Lampiran 10. DOKUMEN PENDIRIAN PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA	150
Lampiran 11. KORAN SUARA RAKJAT SUMATRA TAHUN 1958 PALEMBANG	152
Lampiran 12. KORAN HALUAN TAHUN 1957	155
Lampiran 13. KORAN BATANGHARI SEMBILAN TAHUN 1960 PALEMBANG ..	156
Lampiran 14. STRUKTUR ORGANISASI TT II/SRIWIJAYA.....	159
Lampiran 15. LETNAN KOLONEL BARLIAN	160
Lampiran 16. PENANDATANGANAN NASKAH SERAH TERIMA JABATAN LETKOL. BARLIAN KE LETKOL. HARUN SOHAR.....	162
Lampiran 17. PENANGKAPAN GEROMBOLAN PRRI YANG BERHASIL DIAMANKAN KOMOD BATURAJA.....	163
Lampiran 18. PENYITAN SENJATA GEROMBOLAN PRRI.....	164
Lampiran 19. WAWANCARA DENGAN BAPAK FUAD MANTAN PASUKAN PRRI SUMSEL.....	165
Lampiran 20. WAWANCARA DENGAN BAPAK HAROM MANTAN PASUKAN PRRI SUMSEL	166
Lampiran 21. DUA TOKOH MANTAN PASUKAN PRRI SUMSEL	167

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 (Sumbangan Materi Pemberontakan PRRI Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII Di SMA Srijaya Negara Kota Palembang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana proses terbentuknya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961, bagaimana proses terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961, dan bagaimana akhir dari pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan proses terbentuknya pemberontakan, terjadinya pemberontakan, dan akhir dari pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Historis dengan empat tahapan seperti: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi melalui pengumpulan data dari sumber-sumber buku, arsip, jurnal, koran, dan wawancara tokoh yang ditulis secara sistematis dan analisis dibantu dengan pendekatan ilmu politik, ekonomi dan sosiologi. Hasil penelitian yang berdasarkan data-data dari sumber sejarah diolah secara sistematis menunjukkan bahwa eksistensi gerakan PRRI di provinsi Sumatera Selatan ternyata memberikan dukungan besar kepada gerakan PRRI Pusat (Sumatera Tengah), walaupun selama ini penulisan sejarah terkait pemberontakan PRRI hanya terbatas di wilayah Sumatera Tengah dan sekitarnya. Keberadaan PRRI Sumatera Selatan yang berbasis perang gerilya memberikan perlawanan sengit terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia sehingga membuat Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menumpas gerakan pemberontakan ini.

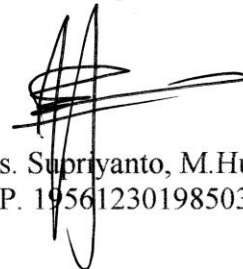
Kata Kunci : Pemberontakan, PRRI, Sumatera Selatan

Pembimbing I



Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002

Pembimbing II



Drs. Supriyanto, M.Hum.
NIP. 195612301985031001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

ABSTRACT

This research is entitled "Revolutionary Government Revolt of the Republic of Indonesia in South Sumatra on 1956-1961 (Material Contribution of PRRI Rebellion on Indonesian History Subject of Third Class on SMA Srijaya Negara Palembang). The formulate of the problem in the research is how the process of the formation of the Republic of Indonesia Revolutionary Rebellion (PRRI) In South Sumatra on 1956-1961, how was the process of the PRRI rebellion in South Sumatra on 1956-1961, and how was the end of the PRRI rebellion in South Sumatra on 1956-1961. The purpose of this study is to explain the process of rebellion, the occurrence of rebellion, and the end of the PRRI rebellion in South Sumatra on 1956-1961. The method used in this study is Historical with four stages such as: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography through collecting data from book sources, archives, journals, newspapers, and interviewing characters who are written systematically and analysis is assisted with a scientific approach politics, economics and sociology. The results of research based on data from historical sources are systematically processed to show that the existence of the PRRI movement in the province of South Sumatra turned out to provide great support to the Central PRRI (Central Sumatra) movement, although so far the history writing related to the PRRI rebellion is limited to the Central Sumatra region and around it. The existence of the PRRI based on guerrilla warfare in South Sumatra gave fierce resistance to the Indonesian Republican Armed Forces, which made the Indonesian Government overwhelmed in fighting to the rebellion.

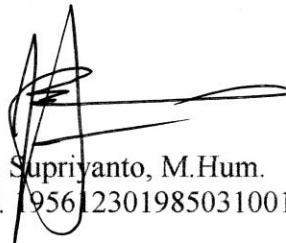
Keyword : Rebellion, PRRI, South Sumatra

Advisor I



Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002

Advisor II



Drs. Supriyanto, M.Hum.
NIP. 195612301985031001

Approved by,
Coordinator Of History Education Study Program



Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki periode Demokrasi Liberal (1950-1957), Indonesia mencoba menerapkan praktik demokrasi sebeb-bebasnya dengan cara membiarkan semua ide, gagasan, dan ideologi bersaing secara sehat dalam kontestasi perpolitikan nasional untuk memperebutkan kursi di dalam pemerintahan. Penerapan Demokrasi Liberal yang meniru parlemen Belanda tersebut ternyata mengalami kegagalan karena tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Demokrasi Liberal menawarkan sistem multipartai yang berujung pada pembentukan kabinet koalisi yang berisi orang-orang dengan orientasi politik berbeda-beda. Perbedaan orientasi ini menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan untuk meraih konsensus sehingga keserasian politik dan stabilitas nasional begitu sulit untuk dicapai (Kahin dan Kahin, 1997: 49).

Polarisasi partai pada era Demokrasi Liberal menjadi salah satu penyebab jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan. Kabinet yang dibentuk rata-rata hanya memiliki usia jabatan satu sampai dua tahun. Sudah tentu pembangunan nasional menjadi terhambat dan tidak efektif akibat program kerja kabinet yang tidak bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Elite politik yang disibukkan dengan perebutan kekuasaan di pusat, mengalihkan perhatian pemerintah pusat dalam mengurus permasalahan di daerah sehingga permasalahan sosial, ekonomi, politik dan pembangunan menjadi terabaikan. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat daerah dan menimbulkan degradasi kepercayaan terhadap pemerintah pusat (Notosusanto, 1985: 62; Ricklefs, 2007: 355). Oleh karena itu, akumulasi kekecewaan masyarakat menjadi latar belakang munculnya pergolakan di daerah, khususnya di Pulau Sumatera.

Pergolakan daerah pertama diawali oleh perombakan kebijakan nasional yang dilakukan kabinet Ali Sastrodarmasjito I (1953-1954) seperti contoh misalnya pencabutan akomodasi modal asing yang telah diterapkan sejak Kabinet Hatta, Natsir, Sukiman, dan Wilopo. Ali menganggap akomodasi modal asing merupakan salah satu sumber permasalahan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan dropping pegawai pusat ke daerah yang dijadikan sebagai birokrat pada instansi pemerintahan daerah. Hal tersebut ditentang oleh tokoh-tokoh terkemuka daerah karena akan menghilangkan peranan putra daerah dalam membangun daerahnya sendiri (Pham, 2019: 121-122). Kebijakan ini menjadi cikal bakal berlakunya sistem sentralisme administrasi di Indonesia.

Sistem sentralisme yang dilakukan Kabinet Ali memicu keinginan daerah untuk mendapatkan pemberian otonomi seluas-luasnya di berbagai bidang, seperti bidang administrasi pemerintahan, kewenangan, dan keuangan yang dinilai mampu menyejahterakan rakyat di daerah. Selanjutnya kewenangan pemerintah pusat hanya mencakup kepentingan nasional semata seperti mengatur keamanan, hubungan luar negeri, dan industrialisasi. Dengan kata lain pemerintahan daerah diberi wewenang lebih luas dan komposisi pejabat daerah diisi oleh para pemimpin yang berasal dari daerah tersebut agar pembangunan berjalan lebih efektif bersama putra daerah yang mampu menyerap aspirasi rakyat secara langsung (Leirissa, 1991: 9-10).

Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari Moh. Hatta karena Hatta menyadari bahwa sesungguhnya yang mengerti atas kebutuhan daerah tersebut adalah daerah itu sendiri. Pada tahun 1956, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang (UU) tentang pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Secara substansial UU tersebut telah memenuhi kehendak daerah akan cita-cita desentralisasi tetapi pelaksanaannya masih tetap tidak memuaskan. Menurut Thee Kian Wie (1996) dalam Bambang Purwanto (2013) menyebutkan Indonesia dibayangi ketidakstabilan politik, konflik antara sentralisme dan regionalisme, pembangunan ekonomi yang lambat, percepatan inflasi dan peningkatan anggaran defisit menyebabkan daerah menilai bahwa pemerintah pusat telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh daerah (terutama golongan militer) mulai mengadakan perdagangan

yang menyimpang dari prosedur pemerintah pusat (penggelapan). Seperti contoh, aksi penyeludupan di Teluk Nibung di bawah koordinasi Panglima Simbolon (TT I/Bukit Barisan) dengan nama Operasi Militer Darurat, dan aksi penggelapan kopra yang dilakukan oleh Panglima Joop Warouw (TT VII/Wirabuana) di Sulawesi (Syamdani: 2008: 43-44; Purwanto, 2013: 87; Harvey, 1989: 10).

Pada sektor politik kedekatan para pemimpin pusat dengan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu pemicu memanasnya hubungan pusat dan daerah. Golongan militer di Sumatera sangat anti dengan ideologi Komunisme yang dinilai bersifat internasional. Para tokoh militer Sumatera kemudian membentuk koalisi bersama partai-partai politik yang bersebrangan dengan PKI seperti partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Koalisi ini kemudian mulai menggalang kekuatan di Sumatera dengan membangun pondasi dan ideologi politik di bawah satu organisasi bersama bernama Dewan Daerah (DD). Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Medan, Dewan Manguni di Manado, Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Mietzner, 2008: 434; Dinas Sejarah TNI - AD, 1978: 115-117; Mahjuma, 1972: 259-261).

Melihat kondisi pembangunan daerah yang semakin tidak memuaskan membuat para pemimpin Dewan Daerah mulai mengambil alih kekuasaan politik daerah guna menjalankan cita-cita pembangunan daerah. Gubernur daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat dituntut menarik diri dari pemerintahan daerah dan menyerahkan kepemimpinannya pada Dewan Daerah. Di Sumatera Tengah, Gubernur Ruslan Muljoharjo menyerahkan segala tugas pemerintahan kepada ketua Dewan Banteng. Sedangkan di Sumatera Selatan, Letkol Barlian memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat sehingga Gubernur Winarno mengajukan permohonan berhenti kepada Menteri Dalam Negeri. Atas keputusan pengunduran diri Winarno sebagai Gubernur Sumsel, maka pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat Sumatera Selatan yang melahirkan “Piagam Perjuangan Sumatera Selatan” dan “Dewan Garuda” (Kahin dan Kahin, 1997: 71-73; Leirissa, 1991: 35-71).

Aktivitas politik Dewan Daerah mulai dianggap berbahaya bagi pemerintah pusat karena dinilai berupaya membuat jarak antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menimbulkan ketegangan politik berskala nasional. Pada tanggal 15 Februari 1958, puncak ketegangan antara pusat dan daerah meledak. Dewan Daerah memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan tandingan dan menegaskan bahwa mereka terbebas dari kewajiban taat kepada Soekarno selaku kepala negara (Salim, 1971: 17).

Aksi Dewan Daerah yang mendirikan PRRI mendapat tanggapan serius dari Dewan Garuda. Sejak awal berdiri, internal Dewan Garuda sudah terjadi keretakan antara tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Terdapat dua kubu yang sama-sama dekat dengan pemerintah pusat dan DD. Kubu pertama yang condong lebih dekat dengan pemerintah pusat ialah Bambang Utoyo dan Ryacudu. Sedangkan kubu kedua yang condong lebih dekat dengan DD ialah Nawawi. Menyadari konflik dingin antara tokoh-tokoh militer dalam Dewan Garuda, membuat Letkol Barlian dilema dan secepatnya mencari jalan tengah yang tidak merugikan satu sama lain termasuk Dewan Garuda itu sendiri. Setelah konflik antara PRRI dan pemerintah pusat meletus, Barlian memutuskan bahwa Dewan Garuda tidak terlibat di dalamnya karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan secara matang terhitung dari kondisi personel militer, persenjataan dan perlengkapan lainnya. Walaupun Dewan Garuda menarik diri dari pergolakan daerah, Letkol Barlian tetap mempersilahkan kepada pihak-pihak yang tetap ingin bergabung dengan DD untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita pembangunan. Anggota Dewan Garuda yang memutuskan untuk tetap bergabung dalam PRRI adalah Mayor Nawawi. Dengan dibekali persenjataan, logistik dan perlengkapan lain, Mayor Nawawi beserta sejumlah pengikutnya bertolak ke Bengkulu untuk membentuk pasukan PRRI disana (Djarab, 2004: 280; Dewi, 2008: 108).

Pada penelitian sebelumnya, pembentukan Dewan Garuda telah dibahas oleh Lindawati dalam penelitian yang berjudul "Dewan Garuda di Sumatera Selatan (1956-1958)". Beliau hanya menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang

pembentukan Dewan Garuda dan hubungannya dengan PRRI (Nasional) tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemberontakan PRRI di Sumsel dan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian Mugiyati dengan judul “Peranan Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution Dalam Menumpas Gerakan PRRI/Permesta (1958-1961) menjelaskan tentang bagaimana KSAD dan pemerintah pusat menanggapi dan menumpas pemberontakan PRRI secara nasional di berbagai daerah. Penulis hendak menggali lebih jauh informasi mengenai pemberontakan PRRI dan ingin merekonstruksikan ulang peristiwa PRRI di Sumsel melalui penelitian ini.

Dalam penelitian berjudul “Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Selatan tahun 1956 – 1961 (Sumbangan Materi Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII di SMA Srijaya Negara Palembang)” dipandang sebagai usaha penulis untuk merekonstruksikan ulang peristiwa PRRI di Sumsel. Penulis sangat tertarik menelusuri konflik internal dalam NKRI pasca kemerdekaan di Pulau Sumatera, terlebih khusus di Daerah Sumatera Selatan. Mengapa dahulu tokoh-tokoh daerah di Sumsel mendirikan Dewan Garuda. Dan bagaimana proses terjadinya pemberontakan PRRI di Sumsel serta bagaimana akhir dari pemberontakan PRRI di Sumsel. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji ulang peristiwa pemberontakan PRRI di Sumsel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terbentuknya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 ?
2. Bagaimana proses terjadinya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 ?
3. Bagaimana akhir Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 ?

1.3 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah ini digunakan agar penelitian tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dibuat suatu batasan. Adapun batasan yang dimaksud ialah :

1.3.1 Skup Temikal

Skup tematikal berfungsi untuk membatasi tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tema Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses terbentuknya pemberontakan PRRI di Sumsel, jalannya pemberontakan, dan akhir dari pemberontakan.

1.3.2 Skup Spasial

Skup spasial merupakan pembatasan wilayah penelitian, agar penelitian ini tidak keluar dari wilayah atau objek peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membatasi wilayah penelitian di provinsi Sumatera Selatan tepatnya di daerah Palembang, Musi Banyuasin, dan Bengkulu sebagai objek kajian. Penulis hanya melakukan penelitian di tiga wilayah tersebut, karena pemberontakan PRRI hanya terjadi disana. Sedangkan untuk daerah lain di wilayah Sumsel, tidak ada aktivitas pemberontakan PRRI.

1.3.3 Skup Temporal

Skup temporal merupakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi atau berlangsung. Dalam penelitian ini kurun waktu peristiwa yang akan ditulis adalah tahun 1956 sampai dengan 1961. Pengambilan tahun tersebut didasarkan pada bermulanya permasalahan pergolakan daerah pada tahun 1956 dan berakhirnya pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan tahun 1961. Oleh karena itu, penulis mengambilnya sebagai skup temporal dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menjelaskan Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan proses terbentuknya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961.

2. Untuk menjelaskan proses terjadinya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961.
3. Untuk menjelaskan akhir dari Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk :

- 1.5.1** Sebagai syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah.
- 1.5.2** menambah sumber informasi bagi yang memerlukan.
- 1.5.3** memperbanyak khasanah sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ma' moen. 1991. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan.
- Abadi, Husnu dkk. 2008. *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah*. Jakarta: Republika
- Alian. 2017. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Palembang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
- Asnan, Gusti. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Chandra, Ryllian. 2015. *Kontestasi Politik Di Palembang 1950-1970: Dinamika Politik Islam Dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Dinas Sejarah TNI - AD. 1978. *Penumpasan Pemberontakan Separatisme Di Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dinas Sejarah
- Dydo, Todiruan. 1989. *Pergolakan Politik Tentara : Sebelum dan Sesudah G30S/PKI*. Jakarta: Golden Terayon Press
- Djarab, Hendarmin. 2004. *Mendahului Semangat Zaman : Letkol Barlian (Panglima TT II Sriwijaya 1956-1958)*. Jakarta: Cikal Media.
- Djamhari, Saleh As'ad. 1971. *Ichthisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang)*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kelompok Pusat Sedjarah ABRI
- Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran Dan Jasa Mohammad Natsir Dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Haris, Yusman. 2010. *Pergolakan-Pergolakan Di Daerh Musi Banyuasin*. Palembang: Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin

- Hanafiah, Djohan. 1998. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Tingkat II Palembang
- _____. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
- Harvey, Barbara Silirs. 1984. *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Imran, Amrin dkk. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan-Darat*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sedjarah ABRI
- Irwanto, Dedi dan Sair, Alian. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Kahin, Audrey. 2008. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia (1926-1998)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kahin, Audrey dan Kahin, Goerge McT. 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyikap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Kementerian Penerangan. 1954. *Republik Indonesia : Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology : Methods and Techniques*. New Delhi: New Age Internasional Publishers
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- _____. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- _____. 1991. *PRRI/Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Makalah. Dalam: Seminar Sehari “PRRI Permesta Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia”. Jakarta, 30 November 1991: Yayasan Lembaga Penelitian Sejarah dan Kebudayaan
- Mahendra, dkk. 2011. *Membaca Sjafruddin Prawiranegara (Dari Ekonomi Sampai PRRI)*. Jakarta: Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) bekerja sama dengan Abadi Publishing & Printing

- May, Eni. 2015. *Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Dan Gagalnya Penerapan Sistem Otonomi Daerah di Sumatera Barat 1956-1961*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya Universitas Andalas
- Mahjuma, FA. 1972. *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI – AD
- Muhaimin, Yahya A. 2009. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Notosusanto, Nugroho. 1985. *Perjuangan dan Prajurit*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Nuryanti, Reni. 2011. *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Pambudi, Eko Punto, dkk. 2011. *Seri Buku Tempo Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Pangabean, M. 1993. *Berjuang dan Mengabdikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Pham, Van Thuy. 2019. *Beyond Political Skin*. Singapore: Springer
- Poesponegoro, Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 2011. *Sejarah Nasional Indonesia : Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rachmat, Redi dkk. 1992. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Rosidi, Ajip. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Salim, Makmum. 1971. *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sedjarah ABRI
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad. 2011. *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Sugono, D., dkk. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia

- Sumaatmadja, Nursid. 2006. *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES
- Suryana. 2010. *Metodelogi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1996. *Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah Dan Perjuangannya*. Jakarta: Intermedia
- Syamdani. 2008. *PRRI : Pemberontakan atau Bukan ?*. Yogyakarta: Medpress
- Trihadi. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Udara*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sedjarah ABRI
- Yuarsa, Feris. 2016. *Mohammad Isa (Pejuang Kemerdekaan Yang Visioner)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yulianto, Dwi Pratomo. 2005. *Militer dan Kekuasaan (Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia)*. Yogyakarta: Narasi

Skripsi :

- Dewi, Fera Yuliana. 2007. *Desentralisasi Daerah Di Palembang Tahun 1948 – 1957*. Tesis. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. Depok.
- Lindawati, 2006. *Dewan Garuda di Sumatera Selatan (1956-1958)*. Skripsi. Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
- Rucheti, Dewi. 2012. *Pergolakan Politik Pada Masa Kabinet Djuanda (Studi Tentang Peristiwa Cikini 30 November 1957)*. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Jurnal :

- Baharuddin. 2015. *Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan*. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah. 9 (2). 180-205
- Chandra, Ryllian. 2016. *KARET PALEMBANG: Perseteruan Pusat dan Daerah Tahun 1950-an*. TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. 16 (1). 21-45

- Fauziyah, Amatullah dan Yusuf, Syafruddin. 2020. *Peranan Letnan I Nawawi Manaf Di Bengkulu Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949*. Jurnal Agastya. 10 (1). 67-88
- Mietzner, Marcus. 2008. *Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal interparty competition*. Journal of Southeast Asian Studies. 39(3): 431-453
- Purwanto, Bambang. 2013. *'Guided Economics': The Construction of Postcolonial Indonesian Political Images, 1950s-1960s*. Lembaran Sejarah. 10 (1): 87-95
- Sato, Yuri. 2003. *Democratizing Indonesia: Reformasi Period in Historical Perspective*. Academic Research Respository at The Institute of Developing Economies. 1 (1): 1-31
- Sholehudin, Miftahus. 2015. *ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional*. Jurnal El-Qudwah. 10 (1): 1-16
- Tambunan, Wahyu Irwansyah. 2014. *Gerakan Politik S.M. Kartosoewirjo (DI/TII 1949 – 1962)*. Jurnal Politeia. 6 (1): 26-27

Surat Kabar

Harian Umum Nasional (Haluan) (Padang, 1957)

Suara Rakyat Sumatra (Palembang, 1958)

Batanghari Sembilan (Palembang, 1960)

Arsip

ANRI. 2012. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid II*. Berkas mengenai Laporan-Laporan Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri Mengenai Masalah Gangguan Keamanan, Hubungan Antara Kedutaan Rusia dan Kedutaan RRT, Aktivitas PRRI, PKI dan SEATO 1954. 11 Oktober 1954. No. Arsip: 511

ANRI. 2012. *Konstituante 1956-1960*. Berkas Pernyataan Agar Memberantas Pemberontakan PRRI 1957-1959 dan Guntingan Koran Mengenai PRRI Di Sumatera Barat 1958. No. Arsip: 119 dan 121